

**MERAWAT PANCASILA DI NEGERI SYARIAT ISLAM**  
(Pemahaman Nilai-nilai Pancasila oleh Masyarakat Perdesaan Aceh Barat)

Triyanto<sup>1</sup>, Yeni Sri Lestari<sup>2</sup>, Irma Juraida<sup>3</sup>, Rahmah Husna Yana<sup>4</sup>  
Prodi Sosiologi Fisip Universitas Teuku Umar  
[triyanto@utu.ac.id](mailto:triyanto@utu.ac.id), [yeni.lestari24@yahoo.com](mailto:yeni.lestari24@yahoo.com), [irmajuraida@gmail.com](mailto:irmajuraida@gmail.com),  
[rahmahhusnayana@utu.ac.id](mailto:rahmahhusnayana@utu.ac.id)

**Abstract**

*There has been a lot of attention on the implementation of Islamic Sharia in Aceh, and some have even linked it to human rights violations. The most important thing for Indonesian citizens is that the implementation of Islamic law can be regarded as a denial of the Pancasila as the basis of the state which has played a close role in binding Indonesian unity. If Jakarta has permitted the implementation of Islamic Sharia in Aceh, then how do Acehnese citizens take care of Pancasila? The research data shows that the implementation of Islamic Sharia does not violate Pancasila but precisely the actual implementation of the first principle of Pancasila. To that end, caring for Pancasila requires many community leaders in rural areas such as the older generation who still view the importance of Pancasila as the basis of the state, given the many differences that exist in Indonesian society. In addition to these community leaders, the socialization carried out by the regional government must choose people who are truly capable of transforming their understanding of the harmony of Islamic Sharia with Pancasila and not merely ceremonial socialization that only stops with people or figures and formal officials who have never fight for the existence of Pancasila in Aceh.*

*Keywords: Pancasila, Islamic Sharia, Aceh, Indonesia, Intolerance, ideology*

**1. Latar Belakang**

Setiap hari senin pagi masih terlihat dan terdengar lantang dibacakannya Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika diperhatikan dengan seksama, pembacaannya ada yang dilakukan pembina namun ada juga yang dilakukan petugas upacara. Ini bukan masalah utama, bahkan sebagai bangsa Indonesia wajib bersyukur pembacaan Pancasila masih menjadi bagian dalam tata laksana upacara dan tidak peduli yang membacakan petugas atau pun pembina. Wajib bersyukur dikarenakan bangsa ini masih mengakui, meskipun sosialisasi bisa dikatakan minim sekali.

Kondisi ini membuat seolah bangsa ini sedang rapuh dan rentan dengan kehancuran. Kasus intoleransi semakin banyak dan mengemuka baik di media cetak maupun elektronik dengan masalah dasar perbedaan, khususnya perbedaan keyakinan. Masyarakat di sebuah dusun di Kabupaten Bantul Yogyakarta sepakat untuk menolak adanya warga negara Indonesia non muslim di daerahnya, merupakan tindakan intoleransi dan dapat merusak kebhinekaan dan rasa persatuan Indonesia (Anonymous, 2019). Meskipun faktanya pembakaran rumah ibadah, Menteri Agama Lukman Hakim meyakini kasus di Singkil agama bukanlah masalah utama, melainkan dipicu oleh faktor kepentingan lainnya (Erdianto, 2016). Hal ini seolah berbalas pantun dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya di Tolikara dimana mushala dibakar dan penyerangan terhadap umat muslim yang sedang shalat Idul Fitri (Fadil, 2015).

Revitalisasi Pancasila menjadi sangat penting pada saat ini. Pancasila bukan hanya harus diletakkan pada tataran pengetahuan kandungan dan makna yang dipahami seluruh warga masyarakat, tetapi harus diimplementasikan oleh setiap warga negara. Saat ini ibarat tumbuhan, Pancasila seolah sedang meranggas dan sangat kering bagai hidup pada musim kemarau. Untuk itu implementasi dari revitalisasi bisa dijadikan proses penyiraman air kehidupan bagi pohon Pancasila yang kekeringan. Namun, revitalisasi bukan semudah membalikkan sebuah telapak tangan. Revitalisasi dalam implementasinya memerlukan proses yang serius dan dijalankan dengan benar. Masih diibaratkan dengan proses penyiraman tanaman tadi, seorang penyiram tanaman entah petani, pekebun, atau siapapun harus menyadari bahwa ember atau selang yang digunakan tidak boleh bocor, karena kebocoran itu akan menjadi penghambat sampainya air kepada tanaman. Semakin besar lobang di ember semakin besar kebocoran yang mengakibatkan banyaknya air keluar di perjalanan sehingga tujuan penyiraman menjadi tidak maksimal. Untuk itu, kasus-kasus intoleransi harus diselesaikan secara benar sebagaimana aturan yang berlaku.

Kasus intoleransi memang banyak didominasi perbedaan-perbedaan keyakinan atau agama. Tentu bukan hanya antar agama tetapi juga intra agama. Antar agama menunjuk pada antara agama yang satu dengan agama yang lain, sedangkan intra agama menunjuk pada persamaan agama. Pada kasus intra agama kedua belah pihak memiliki identitas agama yang sama, namun memiliki perbedaan kelompok, organisasi, sekte dan lainnya yang pada akhirnya kadang-kadang memiliki aktivitas, ritual atau penafsiran yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Masyarakat Aceh memiliki keyakinan agama yang sangat kental dan dituangkan dalam pelaksanaan syariat Islam. Pandangan yang sangat kuat saat membandingkan antara syariat Islam dan Pancasila adalah bahwa sebagian menonjolkan menjalani syariat Islam lebih sempurna dibandingkan Pancasila. Pandangan-pandangan seperti ini penting untuk diperhatikan jika menginginkan Pancasila tetap diakui menjadi dasar negara di wilayah ini. Lalu bagaimana merawat Pancasila di daerah yang masyarakatnya

memiliki pandangan sebagaimana tersebut di atas? Hal ini memiliki tantangan tersendiri bagi setiap warga negara yang berusaha merawat Pancasila di daerah tersebut khususnya di perdesaan Aceh Barat dimana provinsi ini telah memberlakukan syariat Islam.

## 2. Tinjauan pustaka

Banyak kajian Pancasila yang dihubungkan dengan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan. Sebagai contoh pertama adalah kajian Iwan Nugroho yang mengambil judul “Nilai-nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup” (Nugroho, 2010).

Dengan judul tersebut tampak Nugroho mencoba memaparkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada tingkat pengelola negara ditunjukkan dengan kemampuannya dalam merumuskan aturan dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Sementara itu sumber daya manusia yang berkualitas pada level pelaku ekonomi ditunjukkan dengan kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan, dan pelaksanaan pembangunan yang baik, baik itu pembangunan fisik dan non fisik. Tentu saja kualitas sumber daya manusia ini berkaitan dengan karakter, etos kerja, dan religiusitasnya.

Kajian lainnya berhubungan dengan karakter sumber daya manusia adalah kajian Nikodemus T. Martoredjo yang berjudul “*Building Character Through Pancasila Values to Sovereign Nation*” (Martoredjo, 2016). Dalam kajiannya Martoredjo mengemukakan bahwa globalisasi sedang melanda, menggerus nilai-nilai yang ada. Namun, kita harus bisa bertahan dan mendapatkan dampak positifnya saja. Untuk itu penguatan karakter bangsa harus dibangun dan penumbuhan karakter tersebut bisa dilakukan dengan pendidikan. Bukan hanya itu saja, membangun karakter bangsa ini juga dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimana Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Sesungguhnya ada banyak kajian Pancasila yang bisa diekplor lebih lanjut, namun dalam konteks ini disesuaikan dengan Pancasila itu sebagai kiblat dan landasan sikap setiap warganegara yang harus diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi landasan sikap itu bagi sebagian orang dianggap tidak relevan lagi, bahkan nilai-nilai dalam agama lebih tepat digunakan sebagai *the way of life*. Ketika masuk dalam ranah agama, tidak ada yang mampu menyanggahnya dan memang tidak untuk disanggah. Inilah yang menjadi pembahasan dalam artikel ini yang akan membedakan dengan kajian-kajian lainnya.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan secara kualitatif di daerah perdesaan Kabupaten Aceh Barat. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dimana pemilihan informan lebih pada pemahaman masyarakat akan masalah yang dikaji peneliti, informan diambil dengan alasan paling tahu diantara yang lainnya (Sugiyono, 2013). Sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan interview dan observasi, serta menelaah dokumen dari berbagai referensi. Sedangkan analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman. Triangulasi yang merupakan salah satu teknik analisis data dalam konsep Bungin (Bungin, 2012), digunakan untuk menguji keabsahan data.

### **4. Temuan dan pembahasan**

#### **Pemahaman Masyarakat Terhadap Pancasila**

Masyarakat perdesaan Aceh Barat sudah mengenal apa dan bagaimana itu Pancasila. Masyarakat juga sangat memahami tentang syariat Islam, meskipun pemberlakuannya baru saja dibandingkan Pancasila yang sudah diperkenalkan sejak tahun 1945 dimana para pendiri bangsa mempersiapkan kemerdekaan dan harus memiliki dasar negara, dan itu merupakan kehendak bersama (Triyanto & Sri Lestari, 2018).

Akan tetapi tidak semua generasi memiliki pemahaman yang sama, antara generasi tua dan muda memiliki perbedaan yang cukup penting untuk diperhatikan bagi semua pihak. Generasi tua memiliki kecenderungan bahwa Pancasila merupakan hal yang harus diperjuangkan dan tetap menjadi dasar negara ini. Komitmen ini karena generasi ini menyadari betapa besarnya perbedaan secara horizontal dan vertikal yang melekat pada bangsa Indonesia dari Sabang sampai Meurauke (Nasikun, 2009). Perbedaan-perbedaan ini merupakan sumber konflik yang harus diminimalisir agar tercipta kehidupan yang aman, nyaman dan damai, dan hanya dengan kondisi aman kehidupan masyarakat yang nyaman dapat dicapai.

Pada sisi yang lain, generasi muda memiliki variasi pemahaman yang berbeda-beda. Sebagian kelompok memahami maksud dari konsensus para pendiri bangsa yang telah memutuskan Pancasila sebagai dasar negara, dan bukan syariat Islam, meskipun pada saat itu seharusnya bisa saja Islam menjadi dasar negara, meskipun ada keberatan dari berbagai pihak. Pemahaman ini berdasarkan pengetahuan generasi ini mengenai kondisi komposisi bangsa antara mayoritas dan minoritas pada saat itu. Bukan hanya sekedar komposisi keagamaan yang mayoritas saja, tetapi juga kerajaan-kerajaan Islam nusantara dan para kiai bersama santri-santrinya yang telah tercatat di lembaran sejarah bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Triyanto & Mursyidin, 2018). Akan tetapi pada sisi yang lain, kelompok ini juga menyadari arti pentingnya persatuan yang mampu dengan nyata mengusir penjajah Belanda.

Namun bagi kelompok lainnya dalam generasi ini juga, memiliki konsentrasi perbedaan yang lebih dibandingkan kelompok sebelumnya. Baginya ada kekecewaan tersendiri, tentang mengapa kita harus memilih lima sila itu dibandingkan dengan Syariat Islam. Hal ini dinilai merupakan kelemahan iman mayoritas Islam yang terlibat sebagai pendiri bangsa saat itu. Harusnya, keimanan menjadi hal utama karena setelah mati akan ada kehidupan lagi dimana makna agama menjadi lebih berarti dari segalanya. Apalagi, dalam berbagai masyarakat Islam yang tersebar di seluruh Indonesia ini mengerti tentang istilah kehidupan di dunia yang diistilahkan sebagai hidup sebentar bagaikan mampir untuk minum saja dalam sebuah perjalanan panjang menuju Allah SWT. Hidup dunia hanya sementara, kesenangan dan kenikmatan dunia sangat terbatas akhirnya habis, sedang di akhirat Allah memberikan kenikmatan yang tiada habis dan abadi (Ichsan, 2012).

Pada sisi yang lain, syariat Islam tetap menghargai dan menghormati pemeluk agama lainnya. Ajaran agama juga mewajibkan setiap pemeluk agama Islam untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Bukan hanya itu Islam juga mengajarkan untuk melindungi yang lemah, dan memberi sedekah kepada yang kurang mampu agar memiliki kemampuan. Bahkan dalam piagam Madinah, orang-orang yang beragama berbeda mendapatkan kebebasannya, bukan hanya kebebasan beragama tetapi juga diberikan kebebasan dalam aktivitas politik dan menjaga serta mempertahankan keamanan negerinya dari serangan-serangan musuh (Ulya, 2016). Artinya, seharusnya tidak perlu ada ketakutan terhadap Islam ketika menjadi pondasi sebuah negara. Atau, seharusnya pada saat itu bisa disosialisasikan kepada masyarakat khususnya yang minoritas sehingga tidak perlu takut dengan Islam. Sampai saat ini pun, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam juga mayoritas yang beragama Islam tidak sepakat untuk berkehendak memberlakukan syariat Islam di wilayahnya masing-masing kecuali Aceh (Triyanto, 2018).

Kritisi kaum terpelajar yang termasuk dalam golongan generasi tua meskipun punya pemahaman dan pengertian yang sangat baik atas pilihan Pancasila sebagai dasar negara, menunjukkan bahwa dalam konteks kedaerahan seperti syariat Islam di Aceh pantas untuk didukung. Alasannya hal ini tidak bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, dan sebelumnya agama lain juga sudah memberlakukan konsep yang mirip dengan syariat Islam. Penutupan bandara Ngurah Rai, pelabuhan Gilimanuk-Ketapang, dan Padangbai-Lembar pada saat Nyepi sesungguhnya bisa dipandang melebihi daripada Syariat Islam di Aceh. Bahkan, warga masyarakat di larang untuk keluar masuk dari lingkungan rumah, tidak boleh menyalakan lampu di rumahnya dan itu berlaku untuk semua orang baik yang Hindu maupun non Hindu (Triyanto & Sri Lestari, 2018). Masyarakat Hindu Bali tetap keberatan dengan masyarakat Islam yang menyalakan lampu pada saat Nyepi (Pamungkas, 2014), meski pada akhirnya melalui kompromi-kompromi didapatkan solusinya. Masyarakat dan pemerintah tetap

memberikan kebebasan masyarakat Hindu Bali melaksanakan aturan itu, bahkan dikembangkan menjadi berita sebagai sebuah pelaksanaan adat yang menarik dan dipuji-puji.

Sementara itu, syariat Islam hanya berlaku untuk orang Islam saja, tidak ada penutupan bandara, pelabuhan, masyarakat beragama lain bebas di rumahnya asalkan tidak melanggar hukum yang berlaku. Bagi non muslim yang kebetulan tertangkap karena melakukan pelanggaran hukum boleh memilih diproses secara syariat Islam atau menggunakan hukum yang berlaku di negara ini (Triyanto, 2018). Seharusnya lebih menakutkan pada pelaksanaan hari raya yang menutup pelabuhan, bandara, dan tidak memperbolehkan orang keluar rumah bagi umat lain dibandingkan syariat Islam, fakta ini wajar jika kemudian menjadi koreksi bagi yang memiliki pandangan-pandangan negatif terhadap Islam. Faktanya juga, sampai saat ini pelaksanaan syariat Islam selalu disoroti sebagai ketidakbenaran bahkan ada yang menyorot sebagai bentuk pelanggaran HAM (Wardah, 2018). Meskipun tidak dipungkiri pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih diperlukan perbaikan-perbaikan agar lebih baik dan diterima semua pihak.

### **Upaya Merawat Pancasila**

Meskipun sangat minim sekali, sosialisasi masih dilakukan oleh pemerintah daerah dimana urusan ini berada di bawah tanggungjawab kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol). Hasil wawancara dengan pihak kesbangpol ada kendala tersendiri dalam melakukan sosialisasi, yakni terbatasnya dana sehingga hanya tokoh-tokoh dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga-lembaga pemerintah saja yang terjangkau dalam sosialisasi. Hal ini kemudian dipandang sebagai sosialisasi yang sangat minim dan terbatas. Upaya sosialisasi ini demi merawat Pancasila jangan sampai hilang dan tidak dipahami oleh masyarakat. Ramli MS selaku Bupati Aceh Barat menegaskan bahwa Pancasila nyaris hilang akibat dari hilangnya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara (Rahayu, 2018).

Merujuk pada pelaksanaan upaya merawat Pancasila, sesungguhnya masyarakat sendiri telah memiliki modal yang cukup baik. Keberadaan generasi tua yang paham tentang Pancasila sangat menguntungkan bagi upaya merawat Pancasila agar tetap eksis dan tidak hilang dari ingatan masyarakat Aceh yang telah melaksanakan syariat Islam. Generasi muda tentu akan sepakat jika generasi tua-nya masih merawat dan mengimplementasikan Pancasila dalam perilaku sehari-hari.

Merawat Pancasila di Aceh yang telah memberlakukan syariat Islam sesungguhnya tidak susah, yang diperlukan hanyalah kemauan, kerja keras dan kreatif para pelaku upaya merawat Pancasila ini. Kemauan menunjuk pada keinginan yang kuat setiap warga masyarakat untuk tetap berjalan dalam koridor Pancasila, selalu memahami masalah-masalah yang selaras dan tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Akan tetapi, hal ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada masyarakat untuk melakukan sendiri. Urusan ini tetap harus ada yang bertanggungjawab secara kelembagaan dalam pemerintah.

Kerja keras dan kreatif, dalam hal ini merujuk kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab secara kelembagaan tadi benar-benar melakukan tugasnya, yakni menjalankan tugasnya agar Pancasila tetap dikenal dan menjadi pedoman hidup masyarakat tanpa harus bertentangan dengan kearifan lokal. Kreatif yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk antisipasi sekaligus mencari solusi atas potensi penentangan terhadap Pancasila. Masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya Pancasila harus disadarkan betapa 5 (lima) prinsip yang menjadi dasar negara ini harus dijaga dan dipertahankan. Suriyani sebagai salah seorang masyarakat perdesaan Aceh Barat menyatakan:

“Memahami Pancasila itu sangat penting karena itu adalah dasar negara kita, dan juga bukan sekedar dasar negara tetapi juga falsafah bangsa kita yang bersatu akibat banyaknya perbedaan yang ada. Semua perbedaan dari suku-suku bangsa dan budayanya itu hanya bisa disatukan dengan Pancasila itu, dan lagi-lagi semua yang ada dalam Pancasila itu adalah karakter semua suku bangsa kita yang membentuk Indonesia ini.” (Triyanto & Sri Lestari, 2018)

Pandangan Suriyani juga selaras dengan masyarakat satu generasi dengannya, khususnya bagi masyarakat yang memiliki pendidikan. Akan tetapi seperti Saifuddin warga masyarakat yang sudah sangat senior meskipun tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, juga sepemahaman dengan Suriyani. Berkaitan dengan hal itu Syafrudin membuat sebuah simpulan dalam tulisannya dan ternyata memiliki makna yang sama, yakni:

*“a). As an integral component of this nation, we must agree that Pancasila is a revolutionary concept that advanced civilizations, especially for Indonesia, Pancasila as well as forming the character and identity of a great nation, modern, dignified and civilized. b). Pancasila is the ideology of the nation that should be the spirit of every pulse of life of citizens and constitutional activity, because the Pancasila is seen as media acculturation in various partial thoughts on religion, education, cultural, political, social and even economic. So by making the philosophy of Pancasila as a nation, we can realize Indonesian nationalism.”* (Amir, 2013)

Bukan hanya itu, data lapangan juga menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang sependapat bahwa syariat Islam di Aceh merupakan implementasi dari sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam konteks sila pertama terkandung makna bahwa setiap warga negara bebas dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Pancasila bukan hilang dari wilayah Aceh yang memberlakukan syariat Islam melainkan dipandang sebagai penjamin terlaksananya

syariat Islam, asalkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan itu sendiri tidak bertentangan dengan Pancasila.

Sayangnya pemahaman yang baik dari generasi tua dan terpelajar ini tidak secara langsung diturunkan kepada generasi yang lebih muda, sehingga potensi terjadi kesalahpahaman dalam memaknai Pancasila menjadi lebih besar. Terlebih lagi sosialisasi Pancasila tidak menyentuh pada level masyarakat bawah yang kadang-kadang dipandang tidak penting dan tidak strategis. Pancasila hanya dibacakan saat upacara bendera di sekolah-sekolah (Triyanto & Sri Lestari, 2018), namun tidak dibarengi dengan apa makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan butir-butir Pancasila yang sering disebut sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tidak lagi disampaikan atau diajarkan pada pelajar maupun masyarakat.

Secara formal merawat Pancasila memang sangat minim pelaksanaannya, dan cenderung tidak ada yang melakukannya kecuali lembaga pemerintah. Sekolah sebagai tempat menanamkan nilai-nilai Pancasila yang efektif pun sudah meniadakan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila dan digantikan dengan mata pelajaran lain yang dianggap lebih kekinian. Tampaknya perubahan kurikulum yang menggantikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila harus ditinjau kembali, mengingat generasi muda semakin kurang memahami makna dan maksud negara ini menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Apalagi, semakin hari semakin banyak kasus-kasus intoleransi berbau SARA.

Agar Pancasila terawat dengan baik, penting untuk selalu disampaikan dengan tidak pernah berhenti bahwa negara Indonesia ini merdeka karena bersama-sama melawan kolonial Belanda dan bukan sendiri-sendiri. Berabad-abad melakukan perlawanan terhadap penjajahan tidak pernah berhasil mencapai kemerdekaan. Akan tetapi setelah pemuda-pemuda se-Indonesia bersatu, maka tidak lama kemerdekaan dapat diperoleh. Tentu saja bukan hanya sekedar deklarasi bersatu saja, tetapi melawan penjajah bersama-sama. Setelah kemerdekaan diperoleh, demi mempertahankan negara agar tetap utuh maka penting untuk menjadikan ideologi negara bukan berdasarkan satu agama, meskipun tetap memperhatikan agama (Grzywacz, 2013).

Pandangan generasi tua di wilayah kajian telah memahami bahwa menjalankan Pancasila pada sila pertama terwujud dalam pelaksanaan syariat Islam. Sebagian generasi muda mengerti hal tersebut meski tidak sebaik generasi tua sebagai seniornya. Secara umum masyarakat Aceh kepingin meniru konsep Kota Madinah pada zaman rasulullah yang mengakomodir berbagai perbedaan suku bangsa dan juga agama, namun dapat hidup bersama dengan baik dan rukun (Murod, 2011). Meski terkadang masih ada beberapa warga yang pemahamannya tentang konsep syariat islam yang berlaku tidak seperti pemahaman pada masyarakat umumnya. Akan tetapi, hal terpenting dalam merawat Pancasila adalah menjadikan dasar negara ini sebagai moral atau etika politik yang ditaati dan diamalkan dalam penyelenggaraan negara (Nugroho, 2010).



## 5. Penutup

### Simpulan

Merawat Pancasila di Aceh dilaksanakan melalui beberapa cara diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintah. Selain itu pembacaan Pancasila pada upacara-upacara bendera tetap dilaksanakan meskipun hanya sebatas pembacaan dan tidak memungkinkan memberikan penjelasan tentang makna kandungan masing-masing sila. Pada sisi yang lain, warga masyarakat generasi tua masih sangat memahami arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Keberadaan generasi ini sangat efektif dalam merawat hidupnya Pancasila meskipun pada saat ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkemampuan dalam melaksanakan perawatan ideologi negara ini. Sebagian generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik terhadap arti pentingnya Pancasila juga merupakan modal penting bagi keberlanjutan ideologi negara di perdesaan Aceh Barat. Namun, generasi ini memerlukan perhatian yang lebih untuk terus dipupuk pemahamannya, karena generasi ini yang akan melanjutkan sampai tidaknya ideologi negara kepada generasi berikutnya.

## 6. Daftar Pustaka

- Amir, S., 2013. Pancasila As Integration Philosophy of Education And National Character. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 2(1), pp. 54-57.
- Anonymous, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47801818>. [Online] Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47801818> [Accessed 05 April 2019].
- Bungin, B., 2012. *Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Erdianto, K., 2016. <https://nasional.kompas.com/>. [Online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/23/04330051/Tidak.Ada.Intoleransi.di.Aceh.Singkil>. [Accessed 5 April 2019].
- Fadil, I., 2015. <https://www.merdeka.com/peristiwa/>. [Online] Available at: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-tolikara-dan-aceh-singkil-catatan-hitam-toleransi-beragama-kaleidoskop-merdeka-2015.html> [Accessed 5 April 2019].

- Grzywacz, A., 2013. Constructing National identity in Indonesia Experience for Europe. *Mozaik: Jurnal Ilmu Humaniora* , 14(2), pp. 152-166.
- Ichsan, M., 2012. Kehidupan Dunia Dalam Pandangan Al-Qur'an. *Al-Mu'ashirah*, Januari, 9(1), pp. 68-77.
- Martoredjo, N. T., 2016. Building Character Through Pancasila Values to Sovereign Nation. *Humaniora*, pp. 116-121.
- Murod, A. C., 2011. Nasionalisme "Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, XVI(2), pp. 45-58.
- Nasikun, 2009. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, I., 2010. Nilai-nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, pp. 107-128.
- Pamungkas, C., 2014. Toleransi Beragama Dalam Praktik Sosial Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng. *Epesteme*, 9(2), pp. 285-316.
- Rahayu, R., 2018. <http://www.kba.one/news>. [Online] Available at: <http://www.kba.one/news/kesbangpol-aceh-barat-gelar-sosialisasi-pancasila/index.html> [Accessed 4 April 2019].
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Triyanto, 2018. *Etnis Peranakan Tionghoa di Negeri Syariat Islam (Suatu Kajian Adaptasi Dengan Masyarakat Meulaboh)*. Mataram, Penerbit FKIP Universitas Mataram, pp. 1190-1215.
- Triyanto & Mursyidin, 2018. Pancasila dan Syariat Islam di Aceh. In: *20 Tahun Reformasi Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi 1998-2018*. Makassar: Departemen Sosiologi Fisip Unhas, pp. 65-82.
- Triyanto & Sri Lestari, Y., 2018. *Pancasila di Wilayah Syariat Islam: Kajian Pemahaman Nilai-nilai dan Landasan Sikap Toleransi Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Aceh Barat*, Meulaboh: LPPM Universitas Teuku Umar.
- Ulya, I., 2016. Radikalisme Atas Nama Agama: Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. *Addin*, Februari, 10(1), pp. 113-140.

Wardah, F., 2018. *https://www.voaindonesia.com.* [Online]  
Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-minta-penerapan-syariat-islam-lebih-humanis/4544538.html> [Accessed 5 April 2019].